

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI SEKOLAH DASAR

Fredirikus Bulu Dadi

Mahasiswa S2 MSP-GI. UKSW Salatiga

ABSTRAK

Pengembangan kurikulum 2013 mendorong peserta didik agar mampu “mengimplementasikan pemikiran ilmiah dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan melalui kegiatan saintifik untuk observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan” (Djarmiko, 2014: 5). Diharapkan dengan penerapan kurikulum 2013 maka akar masalah pendidikan di Indonesia dapat diatasi. Pengembangan kurikulum 2013 sekolah dasar menitikberatkan pada penyederhanaan, tematikintegratif, pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan penilaian autentik. Kebijakan kurikulum pendidikan dasar tersebut didasarkan pada berbagai regulasi pemerintah khususnya regulasi Kementerian Pendidikan Indonesia serta referensi-referensi lain yang membahas tentang kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan dasar di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengembangan kurikulum, SD*

Pendahuluan

Negara Indonesia menjamin pendidikan bagi warganya sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang antara lain menyatakan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pembukaan UUD 1945 ini sangat menegaskan dan memastikan bahwa rakyat Indonesia harus cerdas karena kecerdasan dibutuhkan bagi pembangunan bangsa Indonesia (Hariatiningsih, 2016: 64). Pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Pengembangan kurikulum merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan pengembangan kurikulum mencerminkan bagaimana kualitas pendidikan sebuah bangsa sebagaimana dikatakan Indriyanto (2012: 441) bahwa “pengembangan kurikulum merupakan intervensi kebijakan mutu pendidikan...karena Kurikulum merupakan bagian dari software bagi berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar yang efektif”. Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum akan sangat menentukan seperti apa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dilaksanakan. Kurikulum memberikan arah yang terencana dan jelas terhadap kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang benar akan nampak melalui implementasi kurikulum yang diterapkan karena “kurikulum merupakan jantung pendidikan” (Munandar, 2017: 55) yang menentukan keberlangsungan pendidikan. Melalui berbagai peraturan dan perundangan pemerintah telah menetapkan kebijakan baik bagi penyelenggaraan pendidikan maupun meningkatkan kompetensi lulusan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kurikulum menjadi bagian dari komponen program yang direncanakan dengan baik dalam pendidikan dan akan dilaksanakan untuk meraih sejumlah tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam perencanaan (Mesiono, Aziz, Syafaruddi, 2019: 59). Namun jika dicermati perubahan kebijakan pendidikan tidak untuk mengatasi akar masalah melainkan lebih berorientasi untuk mengatasi gejala atau simptom yaitu “lemahnya kompetensi lulusan, rendahnya produktivitas dan kualitas karya ilmiah” (Priyatma, 2020: 6). Karena itu menurut Kemristekdikti (2015) sebagaimana dikutip Sulisworo (2016: 128) kualitas pendidikan dan daya saing lulusan dari Indonesia masih jauh

di belakang baik di tingkat internasional, bahkan di tingkat ASEAN. Fenomena ini menjadi perhatian kalangan pendidik di Indonesia terutama dalam diskusi tentang masalah pendidikan yang berkaitan dengan peran pendidikan, manajemen sekolah, kualitas pendidikan, sistem pendidikan, penilaian hasil pendidikan. Salah satu penyebab problem pendidikan di Indonesia menurut Afifah (2015: 43) dapat dilihat adanya problem dalam pembelajaran yang berlangsung di sekolah yaitu faktor pendekatan dalam pembelajaran, faktor perubahan kurikulum, dan faktor kompetensi guru. Peningkatan kualitas proses dan lulusan pendidikan dapat dilakukan melalui pengembangan dan inovasi kurikulum yaitu "pembaharuan dalam pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan" (Kadi dan Awwaliyah, 2017: 148). Kebijakan pemberlakuan Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya inovasi kurikulum untuk mengatasi berbagai problem pendidikan serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan kurikulum 2013 mendorong peserta didik agar mampu "mengimplementasikan pemikiran ilmiah dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan melalui kegiatan saintifik untuk observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan" (Djarmiko, 2014: 5). Diharapkan dengan penerapan kurikulum 2013 maka akar masalah pendidikan di Indonesia dapat diatasi. Pengembangan kurikulum 2013 sekolah dasar menitikberatkan pada penyederhanaan, tematikintegratif, pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan penilaian autentik. Kebijakan kurikulum pendidikan dasar tersebut didasarkan pada berbagai regulasi pemerintah khususnya regulasi Kementerian Pendidikan Indonesia serta referensi-referensi lain yang membahas tentang kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan dasar di Indonesia. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pengembangan kurikulum sekolah dasar dalam Kurikulum 2006, Kurikulum 2013, dan kebijakan merdeka belajar? Alur pembahasan penelitian ini adalah kebijakan pengembangan kurikulum sekolah dasar adalah: kebijakan kurikulum sekolah dasar dalam kurikulum 2006, kebijakan kurikulum sekolah dasar dalam kurikulum 2013, dan kebijakan pengembangan kurikulum sekolah dasar dalam kebijakan merdeka belajar.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) sesuai dengan fokus masalah yang dimunculkan. Menurut Sugiyono (Sari, 2020: 43) penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Surisno (Harahap, 2014: 68) mengatakan bahwa data-data dalam penelitian kepustakaan diambil dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, kamus, dokumen, majalah, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah beberapa jurnal, buku, dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian. Kemudian, Zed (Supriyadi, 2016: 85) mengemukakan empat langkah penelitian kepustakaan, yaitu menyiapkan alat perlengkapan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca dan membuat catatan penelitian. Bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Hasil dan Pembahasan Indonesia mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Menurut Suparlan seperti dikutip Ahmad (2014: 99) kurikulum pertama Indonesia adalah rencana pelajaran 1947. Ketika itu istilah kurikulum belum digunakan. Rencana pelajaran 1947 ini kemudian diubah menjadi rencana pelajaran 1950. Selanjutnya diganti dengan rencana

pelajaran 1958. Dalam perjalanan waktu Rencana pelajaran 1958 ini diperbaiki menjadi rencana pelajaran 1964. Selanjutnya, rencana 1964 berubah menjadi kurikulum 1968. Sejak inilah istilah rencana pelajaran yang sudah digunakan selama bertahun-tahun berganti nama menjadi kurikulum. Kemudian, kurikulum 1968 diganti dengan kurikulum 1975, kemudian dilanjutkan dengan Kurikulum 1984, Kurikulum 1994. Dalam periode waktu berikut muncul kurikulum yang berbasis kompetensi yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 dan yang terakhir Kurikulum 2013. Landasan utama kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan dasar di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang secara eksplisi tampak dalam kebijakan kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) dan penerapan Kurikulum 2013. Kebijakan tentang KTSP berlandaskan pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah, permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah, dan permendiknas nomor 24 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 pemerintah memberi dasar hukum implementasi KTSP. Dalam perjalanan waktu melalui Permendikbud nomor 81A Tahun 2013 pemerintah memberlakukan kurikulum yang disebut Kurikulum 2013. Melalui Permendikbud nomor 67 tahun 2013 ditentukan kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar. Pemerintah menegaskan bahwa kurikulum 2013 Sekolah Dasar menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu. Meskipun kurikulum 2013 baru implementasikan selama kurang lebih 1 tahun namun melalui Permendikbud nomor 160 tahun 2014 pemerintah memberlakukan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 sekaligus. Kebijakan Kurikulum sekolah Dasar dalam Kurikulum 2006 Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) lahir sesuai dengan tuntutan perkembangan yang menghendaki desentralisasi, otonomi, fleksibilitas, dan keluwesan dalam penyelenggaraan pendidikan (Kande, 2008: 79). KTSP disusun dan diimplementasikan pada satuan pendidikan. KTSP meliputi tujuan sekolah dasar, struktur dan muatan kurikulum sekolah dasar, kalender pendidikan, dan silabus. Sebagai seperangkat rencana maka kurikulum digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dalam berbagai jenjang. Penerapan kurikulum diharapkan selaras dengan karakteristik, permasalahan, kebutuhan, dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Kebijakan dan penerapan KTSP sebagai penyempurnaan KBK menurut Baedhowi (2007: 172) memiliki latarbelakang, antara lain: (a) kurikulum-kurikulum yang disusun secara nasional selama ini mengalami banyak kendala di sekolah-sekolah karena kurang menyentuk karakteristik dan potensi masyarakat dan peserta didik; (b) adanya keinginan masyarakat dan stakeholders pendidikan untuk mendekatkan pengembangan kurikulum kepada satuan pendidikan sebagai center of teaching learning process kurikulum; (c) adanya keinginan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada untuk berperan dalam penyusunan kurikulum; (d) sejalan dengan otonomi daerah bidang pendidikan, pemerintah pusat lebih banyak berperan dan berkewajiban menyusun standar-standar pendidikan. KTSP dikembangkan oleh sekolah bersama komite sekolah berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 bahwa "kurikulum tingkat satuan pendidikan ... dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada SKL dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum..." (Bab II, nomor A point 2). Dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 dinyatakan bahwa struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum mata pelajaran di sekolah

dasar terkandung dalam kompetensi yang dibebankan dan harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) kelompok mata pelajaran estetika, (d) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Sedangkan kelompok mata pelajaran tersebut secara rinci diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Struktur kurikulum SD merupakan substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas I sampai dengan kelas VI (Bab II nomor A ayat 1), yang meliputi: (a) muatan 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri; (b) Substansi mata pelajaran IPA dan IPS merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu; (c) pendekatan tematik dalam pembelajaran pada kelas I- III dan pendekatan mata pelajaran pada kelas IV-VI; (d) alokasi jam pelajaran yaitu kelas I (26 jam), kelas II (27 jam), kelas III (28 jam) sedangkan kelas IV-VI 32 jam. Satuan pendidikan boleh menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan; (f) alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit; (g) minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34-38 minggu.

Pembahasan

Tabel 1: Struktur Kurikulum SD/MI

KOMPONEN	KELAS DAN ALOKASI WAKTU			
	I	II	III	IV,V,VI
A. MATA PELAJARAN				
1. Pendidikan Agama				3
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni Budaya dan Keterampilan				4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				4
B. MUATAN LOKAL				2
C. PENGEMBANGAN DIRI				2
JUMLAH	26	27	28	34

Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum 2006 meskipun keduanya masih merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Artinya, pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 meliputi tantangan internal, tantangan ekaternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi (Rusman, 2019: 402) dengan tujuan mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan

warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia (Rusman, 2015: 92). Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012: 2) struktur kurikulum merupakan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar dalam mata pelajaran dan beban belajar setiap minggu untuk setiap siswa. Sedangkan beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama satu semester, dimana kelas I, II, dan III masing-masing 30, 32, 34 dan kelas IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD adalah 40 menit.

Tabel 2: Struktur kurikulum SD/MI

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU					
	I	II	III	IV	V	VI
KELOMPOK A						
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	6	6	6	6	6
Bahasa Indonesia	8	8	10	10	10	10
Matematika	5	6	6	6	6	6
KELOMPOK B						
Seni Budaya dan Prakarya	4	4	4	6	6	6
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4	4	4	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu	30	32	34	36	36	36

Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif dan yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Muatan mata bidang studi IPA dan IPS terintegrasi dalam mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia dan Matematika. Sedangkan dalam struktur kurikulum dinyatakan bahwa beban belajar di SMP untuk Tahun VII, VIII, dan IX masing-masing 38 jam per minggu. Jam belajar SMP adalah 40 menit (Departemen Pendidikan Nasional, 2009: 9). Seluruh kegiatan pembelajaran di SD/MI adalah pembelajaran tematik yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Kebijakan Kurikulum Sekolah Dasar dalam Merdeka Belajar Salah satu wacana yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim adalah merdeka belajar. Tiga kebijakan lain yakni mulai tahun 2021 tidak ada ujian nasional dan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dilakukan di tengah jenjang sekolah, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan peserta didik baru (Sularto, 2020: 14). Menurut Yoga (2020: 14) merdeka belajar dapat dipahami sebagai merdeka berpikir, merdeka berkarya, dan menghormati atau merespons perubahan yang terjadi (memiliki daya suai). Menurut Priyatma (2020: 6) lahirnya konsep ini karena pendidikan telah kehilangan orientasi mendasar, yakni berkembangnya keberanian dan kemandirian

berpikir, tiadanya kebutuhan dan keberanian untuk berpikir mandiri. Semangat belajar adalah sikap diri dan suasana hati yang berkorelasi positif dengan keingintahuan, kepercayaan diri, dan optimism Peristiwa belajar akan berkembang bila dunia pendidikan mampu menumbuhkan kebebasan berpikir dan mencoba serta keterbukaan menerima ketidakberhasilan ataupun kekeliruan. Bagaimana implikasi konsep “merdeka belajar” dalam implementasi di sekolah dasar? Dalam konteks ini ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu penyederhanaan kurikulum, penyelenggaraan ujian nasional, penyederhanaan RPP, profesi guru. Pertama adalah penyederhanaan kurikulum. Tujuan utama menyederhanakan kurikulum adalah membuat kurikulum lebih relevan sehingga kompetensi lulusan pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman, kini dan mendatang. Penyederhanaan kurikulum harus berorientasi dan bervisi masa depan yang semakin disruptif di semua lini kehidupan (Suyanto, 2019: 6). Kurikulum yang selama ini menjadi panduan praksis pendidikan disederhanakan. Keluhan beban kurikulum sudah lama dirasakan. Faktor geografis dan kemampuan pendidik (guru) serta wilayah penyelenggara sekolah selama ini sudah terjadi dalam penerapan kurikulum, antara kurikulum di atas kertas dan kurikulum yang diselenggarakan riil di sekolah. Kedua, penyelenggaraan ujian nasional. Selama ini ujian nasional dirasakan berat oleh sekolah-sekolah, tidak hanya bagi siswa tetapi juga guru. Banyak waktu digunakan sekolah-sekolah untuk menyiapkan ujian nasional terutama menjelang pelaksanaannya. Menyenggarakan praksis pendidikan sesuai dengan kurikulum saja sudah beban berat, apalagi mencapai standar nasional sebagai keberhasilan belajar. Tepat keputusan menteri pendidikan menghapus ujian nasional, diganti dengan asesmen kompetensi dan karakter. Ketiga, penyederhanaan RPP. Jika dalam RP sebelumnya terdiri atas 10-13 komponen maka dalam merdeka belajar diubah menjadi 3 komponen saja, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (Kristiana, 2020: 14). Kebijakan ini sungguh sangat berpihak kepada guru yang sudah lama terbebani membuat RPP yang berhalaman-halaman. Namun menurut Suyanto (2020: 6) kalau RPP hanya satu halaman maka para guru pun tidak yakin bisa membuatnya dengan baik tanpa menguasai esensi RPP itu. Lebih jauh, Kristiana (2020: 11) melihat bahwa tujuan penyusunan RPP adalah untuk memberi kesempatan guru untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif, untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran, dan mempermudah pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dalam konteks ini merdeka belajar menurut Lie (2020: 6) membantu guru dan siswa mencapai kebahagiaan. Guru bahagia dalam mengajar dan siswa menemukan kebahagiaan dalam belajar. Guru dan siswa tidak merasa terbelenggu dalam proses pembelajaran. Keempat, Profesi guru. Guru sebagai profesi yang selama ini diakui sebagai kunci pendidikan dan pembelajaran tetap menjadi faktor strategis dan penting. Guru tidak lagi sebagai satu- satunya sumber ilmu pengetahuan tetapi sebagai rekan yang bersamasama siswa mencari dan menemukan pengetahuan. Namun, guru diandaikan lebih siap. Karena itu, pentinglah guru memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai pendidik bukan sekadar pengaiar (Sularto, 2020: 15). Implikasi konsep merdeka belajar dalam pengembangan kurikulum, khususnya implementasi kurikulum di sekolah dasar menurut Abduhzen (2020: 6) mencakup tujuan, fleksibilitas, kebergunaan. Terkait dengan orientasi tujuan, merdeka belajar akan menjadi proses yang berorientasi pada tujuan. Standar capaian pembelajaran sudah sangat jelas di dalam Kurikulum 2013. Namun cara mencapai standar itulah yang dibebaskan kepada guru agar guru mengembangkan pola interaksi yang sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Di sinilah dituntut kecakapan guru

berimprovisasi agar pembelajaran lebih efektif, diperkaya, menarik dan menyenangkan. Dalam konteks fleksibilitas, ketika menjalankan merdeka belajar, Guru dapat secara luwes memilih dan menentukan strategi atau metode yang digunakan; tetapi ketika proses pembelajaran menemui kendala maka dengan rasa merdeka dan kreativitasnya guru dapat mencari dan memilih strategi atau pendekatan lain untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka kebergunaan, ketika guru dan pengambil kebijakan merencanakan kurikulum maka menurut Menteri Nadiem Makarim harus disaring dengan satu pertanyaan, "Ini apa gunanya bagi murid di masa depan?". Maka ketika guru menyusun RPP dengan memasukkan kompetensi inti dan dasar, pastikan guru memikirkan kegunaannya bagi siswa di masa depan. Artinya, guru tidak sekadar menyiapkan RPP sebagai sebuah "seremoni" tetapi selalu memikirkan manfaat bagi masa depan siswa.

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan kurikulum di sekolah dasar terjadi dalam rentang sejarah bangsa Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut selaras dengan perubahan jaman, kebutuhan dan permasalahan masyarakat, tren perkembangan dan kemajuan yang menuntut lulusan yang relevan dan ter-update.
2. Kurikulum sekolah dasar merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang diimplementasikan melalui kebijakan dan pelaksanaan KBK, KTSP dan Kurikulum 2013.
3. Kurikulum sekolah dasar dalam KTSP memiliki ciri antara lain: mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi sendiri, bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda. tiap jenis konten pembelajaran diajarkan dengan terpisah (*separated curriculum*), tematik untuk kelas I-III tetapi belum terpadu.
4. Kurikulum sekolah dasar dalam kurikulum 2013 memiliki ciri antara lain: tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, mata pelajaran dirancang terkait satu sama lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas, Bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain untuk sikap keterampilan berbahasa, semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain (*cross curriculum* atau *integrated curriculum*), konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan konten penggerak mata pelajaran lainnya, tematik untuk kelas I – VI.
5. Konsep merdeka belajar sangat cocok dalam pembelajaran di sekolah dasar, khususnya dalam kaitan dengan penyederhanaan kurikulum, peran guru, implementasi perencanaan dan proses pembelajaran. Merdeka belajar membantu guru dan siswa sekolah dasar tidak terbelenggu dalam proses pembelajaran melainkan mencapai kebahagiaan karena manusia berjumpa dengan kebermaknaan hidup dalam belajar.
6. Esensi RPP bukan pada jumlah halaman sebagaimana kebijakan RPP satu halaman, namun bagaimana RPP itu menstimulasi pembelajaran agar berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Daftar Pustaka

- Abduhzen, M. (2020, 30 Maret). "Belajar Merdeka Belajar". Kompas, hlm. 6.
- Afifah. N. (2015). Problematika Pendidikan di Indonesia (Telaah dari Aspek pembelajaran). *Elementary*, 1 (1), 42-47. Diakses dari: <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/elementary/article/download/problematikapendidikan-di-indonesia/144>.
- Ahmad, A. (2014). Problematika Kurikulum 2013 Dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah. *Jurnal Pencerahan*. 8 (2), 98- 108. Diakses dari: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPP/article/view/2158>.
- Baedhowi. (2007). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Kebijakan dan Harapan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 65 (13), 171-181.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). Buku Saku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Djarmiko, I. W. (2014). Hakekat Pengembangan Kurikulum 2013 dan Implementasinya dalam Pembelajaran Pada Sekolah Menengah Kejuruan. Makalah disampaikan dalam Workshop Penguasaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kurikulum 2013 Pada tanggal 10 Mei 2014 di SMK Muhammadiyah Prambanan, Yogyakarta. Diakses dari: <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131629061/pengabdian/hakekat-pengembangankurikulum-smk-2013.pdf>.
- Hariatiningsih, A. N. (2016). Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 (Studi Deskriptif Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 Tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Blitar). *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 4 (2), 64-70. Diakses dari: <http://repository.unair.ac.id/46082/>.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8 (1), 68-73. Indriyanto, B. (2012). Pengembangan Kurikulum Sebagai Intervensi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 18 (4), 440-452. diakses dari: <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/100/97>.
- Kadi dan Awwaliyah. (2017). Inovasi Pendidikan: Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 1 (2), 144-155. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/332887333_inovasi_pendidikan_upaya_penyelesaian_problematika_pendidikan_di_indonesia.
- Kande, F. A. (2008). Membedah Kekuatan dan Kelemahan KTSP (Antara Globalisasi Lokal dan Ancaman Disintegrasi Bangsa). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2 (4), 79- 89. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/112742-ID-membedah-kekuatan-dankelemahan-ktsp-ant.pdf>.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012) Dokumen Kurikulum 2013. Jakarta: Kemendikbud.
- Kristiana. D. (2020, 11 Januari). "Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar".
- Pikiran Rakyat, hlm. 14. Lie, A. (2020, 1 Pebruari). "Merdeka Melajar Untuk Kebahagiaan". Kompas, hlm. 6.
- Mesiono, Aziz, Syafaruddi. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Qismul'Aly Medan. Jurnal Ta'dib. 22 (2), 57-65. Diakses dari: <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/takdib/article/view/1450/1457>.
- Munandar, A. (2017). Kurikulum Sebagai Jantung Pendidikan. Prosiding Seminar Nasional Pendidik dan Pengembang Pendidikan Indonesia, IKIP Mataram 14 Oktober 2017. Diakses dari: <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/Semnas/article/view/298>

